

KRITIK KRISTEN TERHADAP KEHIDUPAN BERPOLITIK DI INDONESIA

Syukurman Zebua
mansyukurzebua@gmail.com
Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta

ABSTRAK

Dalam realitas dewasa ini, keterlibatan orang Kristen dalam kehidupan berpolitik di Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Ada juga kecurigaan terhadap orang Kristen yang terlibat dalam bidang politik ataupun batas-batas ideologi yang dapat menimbulkan ketenggagan politik yang bernuansa SARA. Menurut Alhummi "ideologi menjadi garis pembatasan yang telah mengkotak-kotakkan manusia ke dalam kelompok-kelompok politik yang berbeda-beda".¹ Disamping itu banyak orang-orang Kristen yang tidak memahami persoalan-persoalan politik itu sendiri dan hubungannya dengan persoalan-persoalan teologis. Untuk itu kesadaran tipis menyangkut bentuk maupun isi dari kehadiran kekristenan di Indonesia, terutama dalam bidang pelayanan politik merupakan keharusan yang terus menerus dibangun. Pengakuan gereja ketika memasuki dunia berbunyi: "Kristus itu Tuhan." Dalam pengakuan dan kesaksian itu gereja menyatakan bahwa Kristus yang disalibkan, mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah TUHAN dan Juruselamat serta penebus hidup manusia dan dunia.² Pembahasan menyangkut politik dalam bagian ini dimulai dari dua identitas yang berbeda, yakni pengertian mengenai politik pada satu sisi dan etika pada satu sisi yang lain. Hal yang paling dibutuhkan saat ini bagi gereja-gereja di Indonesia adalah perubahan paradigma menuju suatu tatanan yang berangkat dari sudut pandang Alkitab.

Kata kunci: kritik Kristen, kehidupan, berpolitik.

ABSTRACT

In today's reality, Christian involvement in political life in Indonesia is often faced with various problems. There is also suspicion of Christians who are involved in politics or ideological boundaries that can lead to SARA nuanced political discord. According to Alhummi "ideology becomes a limitation line that has divided people into different political groups". Besides that many Christians do not understand the political problems themselves and their relationship with theological issues. For this reason, a thin awareness regarding the form and content of the presence of Christianity in Indonesia, especially in the field of political service, is a necessity that is continuously being built. The confession of the church when entering the world reads: "Christ is Lord." In that confession and testimony, the church declares that the Christ who was crucified, died buried and rose from the dead is the Lord and Savior and Redeemer of human life and the

world. The discussion concerning politics in this section begins with two different identities, namely the understanding of politics on one side and ethics on the other. What is most needed now for the churches in Indonesia is a paradigm shift towards an order that departs from the perspective of the Bible.

Keyword: Christian criticism, life, politics.

PENDAHULUAN

Pengakuan gereja ketika memasuki dunia berbunyi: “Kristus itu Tuhan.” Dalam pengakuan dan kesaksian itu gereja menyatakan bahwa Kristus yang disalibkan, mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah TUHAN dan Juruselamat serta penebus hidup manusia dan dunia.³ Rumusan tersebut di atas secara tersirat dan hendak menyatakan bahwa Kristus juga adalah yang berkuasa atas segenap langit dan bumi. Kristus adalah TUHAN atas kehidupan manusia, kehidupan perkawinan dan keluarga, termasuk di dalam setiap jabatan dan pekerjaan manusia. Dengan kata lain, dalam setiap lapangan kehidupan, dan gereja; oleh sebab itu seyogianya setiap orang Kristen berkewajiban untuk bersaksi kepada dunia bahwa “Kristus itu TUHAN.” Dalam

kehidupan berpolitik pun gereja dan orang Kristen harus menyampaikan kesaksian kepada dunia bahwa “Kristus itu adalah TUHAN.” Sehubungan dengan pernyataan ini, menurut Saut Sirait bahwa “Umat Kristen, baik secara bersama-sama maupun perseorangan harus berupaya, berjerih dan berjuang bagi terwujudnya tatanan politik yang mencitrakan Kerajaan Allah. Ciri yang paling khas dari politik yang didasarkan pada perspektif dari Alkitab, atau kerajaan Allah itu adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran. Secara umum pemikiran teologis-politis di kalangan orang-orang Kristen tercermin di dalam hasil-hasil berbagai sidang dan konsultasi-konsultasi yang dapat disimpulkan dalam pokok-pokok berikut:

³ O.Notohamijoyo, Iman Kristen dan Politik, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1972, 9.

1. Dengan merumuskan berbagai dasar-dasar teologis dan Alkitabiah, ditekankan bahwa orang-orang
2. rakyat dan bangsa, melalui partisipasi yang penuh dengan rasa tanggung jawab dalam bidang politik. Salah satu rumusan yang paling banyak dipergunakan ialah bahwa partisipasi
4. dirinya dengan suatu system politik dan juga tidak bisa mengidentifikasi dirinya dengan suatu partai politik, juga tidak dengan partai politik Kristen.
5. Gereja berkewajiban untuk mempersiapkan anggotanya agar mereka dapat berpartisipasi dengan sabar dan dengan penuh tanggung jawab dalam bidang politik dan gereja harus memberikan pelayanan khusus kepada anggota-anggotanya yang mempunyai tanggung jawab berat dalam bidang politik.
6. Diberikan arti yang kreatif kepada partai yang bernafaskan kristiani dalam rangka pelaksanaan tugas Kristen dalam bidang politik berdasar kenyataan-kenyataan politik di Indonesia sekarang ini, jadi tidak

Kristen harus memenuhi akan tanggungjawabnya terhadap nasib

itu harus dijalankan dalam terang Injil mengenai kerajaan Allah secara positif, kreatif, dan realistik.

3. Gereja tidak dapat mengidentifikasi berdasarkan identifikasi gereja dan parta politik.
7. Orang-orang Kristen dalam partai lain juga menjalankan tugas Kristen dalam bidang politik dan kepada mereka diperdengarkan peringatan-peringatan agar mereka terus menerus bertanya apakah dasar-dasar dan keadaan partai itu memberikan ruang kepada mereka untuk menjalankan tugas politiknya sebagai orang Kristen.
8. Kepada orang-orang Kristen yang menjalankan tugas politik mereka dalam partai-partai yang berlainan dianjurkan untuk mengadakan kerjasama.⁴

Hal itu semakin diperlukan berhubung alam perkembangan yang sedang terjadi di tengah-tengah Indonesia,

⁴ Laporan Sidang Lengkap V PGI, Yesus Kristus Gembala Yang Baik, Tugas Kristen dalam Revolusi

Indonesia, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1972, 276-277.

khususnya di bidang politik. Secara sederhana politik di sini dapat dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan manusia

dalam suatu hubungan yang teratur. Apabila politik diabaikan sebagai kesejahteraan maka salah satu isu yang terutama saat ini ialah masalah ledakan penduduk, kemiskinan, penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, jaminan rasa aman, penegakan hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, tindak amoral, kejahatan dan kekerasan.

Kehadiran orang Kristen dalam realitas kehidupan politik di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan, yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Alkitab, orang Kristen memahami dirinya sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah (I Petrus 2:9). Orang Kristen juga diutus untuk mendirikan tanda-tanda keraja Allah yang bercirikan kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dalam semua aspek kehidupan termasuk bidang politik (Galatia 5:22).

Dalam realitas dewasa ini keterlibatan orang Kristen dalam kehidupan berpolitik di Indonesia seringkali

diperhadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan seperti kecurigaan terhadap orang Kristen yang terlibat dalam bidang politik ataupun adanya batas-batas ideologi yang dapat menimbulkan ketenggagan politik yang bernuansa SARA. Menurut Alhummi “ideologi menjadi garis pembatasan yang telah mengkotak-kotakkan manusia ke dalam kelompok-kelompok politik yang berbeda-beda”.⁵ Disamping itu banyak orang-orang Kristen yang tidak memahami persoalan-persoalan politik itu sendiri dan hubungannya dengan persoalan-persoalan teologis. Beberapa kemungkinan bersifat sementara mengenai hal ini adalah:

Pertama, tidak adanya penjelasan atau pedoman yang jelas menyambkut pemahaman fundamental politik Alkitab pada orang-orang Kristen. Hal ini jelas menimbulkan sikap yang tidak kritis, bahkan apatis pada kalangan orang Kristen. Substansi ekklesiologi, dalam arti pemahaman menyangkut hakikat dan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia.

Kedua masih kuatnya “syndron” atau “fobia” yang berangkat dari pengiyaikan

⁵ Suara Pembaharuan, Rabu, 14 Maret 2001

buta terhadap pernyataan-pernyataan bahwa gereja sama sekali tidak boleh bersinggungan dengan politik. Bila hal itu dijadikan suatu pegangan atau sikap iman, maka gereja akan menjadi terasing terhadap berbagai realitas sosial.

Ketiga tidak adanya visi yang jelas menyangkut kekristenan dan pengalaman sebagai agama minoritas telah mengakibatkan hilangnya motivasi untuk membangun perasaan dan sikap solidaritas terhadap yang lain. Dalam konteks itu orang-orang Kristen justru terjebak, bahkan dalam berbagai perkembangan sejarah kekristenan solidaritas adalah faktor dominan dalam memelihara eksistensi dan kelenturan terhadap berbagai tantangan yang melanggar kekristenan. Disamping itu menjadi salah satu ajaran Yesus, solidaritas itu sendiri yang membuka jalan yang baik bagi pelaksanaan misi Kristen.

Dalam suasana menjelang pemilu ataupun pemilu-pemilu yang akan datang maka setidaknya gereja dan orang-orang Kristen berkewajiban untuk meninjau kembali partisipasinya dalam kehidupan berpolitik, baik teror, intimidasi, pembakaran gedung peribadatan, pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya merupakan suatu kenyataan pahit yang perlu disimak. Hal seperti ini memang bukan

kenyataan baru dalam sejarah gereja atau umat Kristen di Indonesia dan di dunia. Namun dalam perspektif sejarah dan pengembangan hubungan manusia yang semakin maju, hal itu merupakan kepribadian yang luar biasa. Untuk itu kesadaran tipis menyangkut bentuk maupun isi dari kehadiran kekristenan di Indonesia, terutama dalam bidang pelayanan politik merupakan keharusan yang terus menerus dibangun. Dari latar belakang permasalahan inilah penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul : “Kritik Kristen Terhadap Kehidupan Berpolitik di Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan menyangkut politik dalam bagian ini dimulai dari dua identitas yang berbeda, yakni pengertian mengenai politik pada satu sisi dan etika pada satu sisi yang lain. Hal ini penting sebab tidak hanya menyangkut proses perkembangan yang terjadi pada kedua bidang secara sendiri-sendiri, tetapi perkembangan umum yang terjadi bidang ilmu dan kehidupan yang semakin tertuju pada bentuk saling tergantung dan saling mempengaruhi di

dalam berbagai hal. Pengertian politik memiliki berbagai keragaman, para ahli memberikan berbagai pengertiannya tentang politik berdasarkan pemahamannya masing-masing. Secara umum pengertian politik dalam bidang ini digolongkan dalam dua bagian yakni pengertian politik filsafat dan pengertian politik secara praktis. Kata politik ada hubungannya dengan berbagai kata Yunani. Pertama-tama dengan kata *polis* yang berarti *benteng*, lalu berarti *kota*, kemudian berarti *Negara* dan akhirnya *suatu bentuk Negara tertentu, yakni demokrasi*.⁶ Politik yang berasal dari kata polis artinya kota, berkembang menjadi suatu hukum yang ideal diucapkan atau dikatakan atau diberikan untuk suatu area atau divisi sebagai suatu yang mengatur.

Namun demikian pengertian politik itu sendiri sering berubah sesuai perkembangan

yang terjadi, karena itu George Sabirne mengatakan :

Tetapi sepanjang sejarah pemikiran politik perkataan-perkataan tersebut selalu berubah, dan arti itu bergantung kepada lembaga-lembaga dengan mana cita-cita itu harus diwujudkan dan tergantung dari masyarakat dimana badan-badan itu menjalankan fungsinya. Negara-negara kota-kota Yunani adalah demikian berbeda dengan persekutuan-persekutuan hukum yang terdapat dalam zaman modern ini, sehingga tidak mudah untuk menggambarkan kehidupan sosial dan kenegaraan pada waktu itu.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap konteks arti politik itu sendiri dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok setempat. Hal demikian bukan hal baru terjadi dimasa sekarang, tetapi sejak awal perkembangan

⁶ Verkuyl, J. *Etika, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995

⁷ George Sabirne, *Teori-teori Politik*, Jakarta : Binacipta, 1977, 7.

politik di tanah kelahirannya. Di “Yunani”, hal ini sudah terjadi. Politik timbul sebagai bentuk suatu kemasyarakatan baru pada abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi, namun perorganisasian polis tidak selalu dan dimana-mana diadakan dengan cara persis sama.⁸ Jadi jelas bahwa perkembangan politik tidak dapat berubah setiap saat sesuai kebutuhan.

Dengan demikian makna politik dapat ditempatkan di segala keadaan dalam segala kebutuhan sesuai dengan bangsa dan Negara atau masyarakat setempat. Masyarakat atau bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai politik dan hukum yang berlaku, dan semua berjalan dengan baik jika semua pihak, baik masyarakat umum maupun pelaku politik dapat memahami dan menerapkan politik sesuai dengan etika-etika politik dengan tepat dan benar.

Pendekatan teologis terhadap politik merupakan tujuan utama bagian ini, oleh karena itu uraian terhadap makna politik di dalam Alkitab mutlak diperlukan. Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dijadikan asumsi dasar untuk memasuki wacana dalam bab ini yakni :

Pertama, adanya suatu konsep politik dalam kehidupan umat Allah dalam Alkitab, baik dalam gagasan maupun dalam tatanan praktis. Paling tidak dalam Alkitab hidup dalam suatu sistem tertentu.

Kedua, adanya interaksi dengan realitas kehidupan sosial dimana umat Allah hidup. Interaksi ini mau tidak mau akan mengalami benturan dan konflik yang berjuang pada dominasi yang satu dengan yang lain.

Ketiga, adanya perkembangan-perkembangan baik yang dianggap positif atau maupun yang bersifat negatif, semasa

⁸ Prof. Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat

Yunani, Yogyakarta : Kanisius, 1999, 25.

kehidupan nabi-nabi pada masa Perjanjian Lama.

Lebih lanjut lagi menurut Notohamidjojo, pengakuan Gereja Kristen yang didasarkan pada Alkitab ketika memasuki dunia ini yang berbunyi : “Kristus itu Tuhan merupakan suatu tindakan dan pengakuan politis. Tidak ada satu bidang kehidupan yang terkecuali dan terbatas kewibawaan Yesus Kristus”⁹

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas maka berikut ini akan diuraikan mengenai azaz-azas Alkitab tentang politik. Bukanlah kehidupan politik saat ini memerlukan pedoman Alkitabiah untuk arah dan tujuannya.

Dalam Perjanjian Lama (Kejadian 1:1) berbunyi : “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi”. Kepada Dialah segala makhluk dan ciptaan-Nya menyembah. Dialah yang mengatur segala tatanan kehidupan dan alam ini. Dia yang membentuk hukum dan aturan bagi segala

ciptaan-Nya, agar tercipta suatu keteraturan dalam dunia ini. Kalau dilihat dari tata tertib penciptaan, maka Allah dan manusia diciptakan dalam suatu relasi ganda, yaitu secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan manusia atau dengan sesamanya.¹⁰

Dalam Perjanjian Lama banyak sekali ditemukan tokoh-tokoh yang sangat berperan secara aktif dalam panggilan-Nya kepada orang-orang untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini disebut sebagai bapak-bapak leluhur. Tokoh-tokoh tersebut dimulai dari Abraham sampai para Hakim-hakim yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam situasi politik seperti diuraikan diatas, maka jabatan para imam tidak dapat lagi dijamin dan banyak tergantung dari keberhasilannya dalam memelihara

⁹ O. Notohamidjojo, Op. Cit, 9

¹⁰ Broto S. Wiryotenoyo, Kepedulian Krsieten Terhadap Kehidupan Bersama Negarawi, Jakarta : Seminar Harapan, 1998, 79.

ketentraman dalam negeri. Suatu ancaman terhadap perimbangan ini, seperti yang kelihatan pada Yesus tidak akan memperoleh dukungan.

Bagimanakah harus mengartikan sikap Yesus dalam situasi politik dan keadaan masyarakat pada zamannya? Injil-Injil sinoptis menyaksikan bahwa Yesus tidak senang dengan pelanggaran tatanan sosial atau menjadi seorang pembangkang? Ia Cuma memperlakukan kebiasaan yang berlaku sebagai sesuatu yang dapat dikesampingkan bila merintang nilai-nilai yang penting. Bukan tatanan sosial yang diserangNya melainkan penyalahgunaannya oleh orang-orang yang memakainya guna memperbesar kekuasaannya sendiri. Bukan tatanan sosial yang ditentangNya melainkan sikap-sikapnya yang dikecam Yesus, yakni orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan (Lukas 14:11; 18:14), orang-orang yang serakah memandang dengan tamak akan hartanya, merekah yang hidup

dengan harapan hampa (Lukas 12:15-21). orang-orang yang serakah memandang dengan tamak akan hartanya, merekah yang hidup dengan harapan hampa (Lukas 12:15-21).

Klaim teologis bahwa pemerintah itu “berasal”, “ditetapkan”, dan “hamba” Allah yang sesungguhnya mengandung konsepsi politik yang luar biasa. Banyak kalangan yang mempertanyakan dan mempersoalkan pemerintah yang bobrok dan jahat dalam hubungannya dengan legitimasi teologis di dalam surat Roma (Roma 13:1-7) itu, salah kaprah karena surat tersebut dijadikan surat politik, terutama dalam hubungan agama dan Negara. Bukan saja akan timpang sebelah melainkan iman orang-orang Kristen itu sendiri. Rasul Paulus berangkat dari pandangan yang positif, bagi adanya penguasa-penguasa yang positif. Karena itu setiap usaha menjadikan (Roma 13:1-7), sebagai doktrin politik akan membuat

hubungan agama dan Negara menjadi kacau balau dan mendatangkan bencana.

PEMBAHASAN

Pada masa kini, masyarakat Indonesia berada dalam era reformasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peta kehidupan berpolitik di Indonesia berada pada era reformasi. Selanjutnya berikut ini pertama-tama dikemukakan definisi mengenai era reformasi dimana kehidupan berpolitik di Indonesia berada di dalamnya.

Menurut E.G Singgih, menurutnya bahwa :

Era reformasi adalah era dimana bangsa kita Indonesia melakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, agar perekonomian Indonesia menjadi kuat secara fundamental, kemiskinan dan penderitaan rakyat ditangani secara langsung, kehidupan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat yang ditegakkan di dalam lingkup dunia politik, hak-hak manusia dihormati bahkan dibela dan kehidupan bersama di antara umat beragama berjalan secara rukun, wajar dan dialogis.¹¹

Merujuk pada pernyataan diatas, maka sudah seharusnya kehidupan masyarakat Indonesia minimal berada pada tatanan kehidupan yang lebih baik dari masa-reformasi. Namun kenyataannya, menunjukkan pada hal yang sebaliknya. Krisis multidimensi terjadi pada seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Ada berbagai faktor yang tentunya melatarbelakangi terjadinya krisis multidimensi tersebut. Di antara berbagai faktor, itu salah satunya adalah faktor yang cukup dominan adalah faktor politik. Dengan kata lain seluruh permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini berasal dari bidang politik. Dalam suatu konsultasi teologi yang dilakukan oleh STT Jakarta dan PGI, adalah salah satu pokok penting yang disepakati pada konsultasi sebagai pernyataan adalah bahwa “krisis multidimensi yang terjadi di

¹¹ E.G. Singgih, *Iman dan Berpolitik Dalam*

Era Reformasi di Indonesia, Jakarta : BPK Gunung

Mulia, 2000, 4

Indonesia disebabkan oleh praktek dan proses politik tanpa Etika yang selama ini dilakukan oleh sebagian pemimpin bangsa, orientasi yang menghalalkan berbagai cara yang telah melahirkan ketidak jujur, ketidakadilan, dan kekerasan dalam berpolitik".¹²

Dalam kenyataan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, tidak konsisten pada cita-cita awal seperti yang dikemukakan diatas. Nilai tukar rupiah meninggi, sementara rakyat semakin menderita dan disisi lain korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Pada masa Orde Baru kelihatannya suasana bangsa Indonesia mengalami kestabilan tetapi sebenarnya dalam tiga puluh tahun lebih kepemimpinan Soeharto, sendi-sendi kehidupan bangsa, bermasyarakat, dan bernegara menjadi amat rapuh karena bermacam-macam kejahatan politik yakni terjadi korupsi, kolusi dan

nepotisme sudah bagaikan penyakit kanker yang mengakar dan telah menyebar kemana-mana, sehingga sulit untuk diberantas. Dampaknya adalah krisis yang terjadi dalam semua aspek kehidupan. Krisis multidimensi yang terjadi dibayar dengan harga yang sangat mahal, bukan hanya dengan kelaparan, kekurangan gizi dan kematian, tetapi juga hilangnya nilai tertentu dari Masyarakat sebagai bangsa yang beradab dan beragama. Di kalangan masyarakat sering terjadi saling menghujat tanpa sopan santun, saling membunuh dan rasa perikemanusiaan. Lebih buruk lagi orang yang saling membunuh atas nama agama, keadilan, dan demokrasi. Bangsa Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab. Nilai dasar kemanusiaan semakin tidak dianggap penting lagi, akibatnya praktek ketidak-adilan

¹² Suara Pembaharuan, Rabu, 4 Februari

semakin merajalela dalam masyarakat Indonesia.

Rakyat miskin dipedesaan yang selama pemerintahan Soeharto sapi perahan, baik melalui pajak, perampasan dan penggunaan tanah sama sekali tidak pernah mendapat advokasi dari gereja-gereja. Kalangan pekerja kasar dipertokoan dengan pendapatan yang rendah dan sistem hubungan kerja yang tidak berpihak kepada mereka sangat jauh dari perhatian. Tahap para ulama Islam yang isi khotbah Jum'atnya disensor, ditekan dan bahkan yang juga diteror melalui ancaman mau pun dengan kekerasan bahkan dengan penembakan sampai menghilangkan nyawa, gereja-gereja di Indonesia sangat jarang memperlihatkan solidaritasnya yang sejati.

Kebungkaman orang Kristen di dalam struktur ini sungguh mengherankan. Seperti diketahui reformasi 21 Mei 1998 merupakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi bukan sembarang petir di siang bolong.

Sebab beberapa tahun sebelumnya sudah ada suara vocal menuntut perbaikan-perbaikan yang bersifat struktural. Bahkan ada yang menuntut peregeseran pejabat-pejabat yang terlihat dalam kasus korupsi. Ada warisan teologis di masa lampau yang member pemahaman bahwa pemerintah sebagai pelindung. Rasul Paulus giat mengabarkan Injil di dalam imperium Romawi yang kafir bisa melihat pemerintah Romawi –kaisar dan aparatnya sebagai hamba Allah seperti tertulis dalam (Roma 13:1-7). Didalam perikop termasyur ini Paulus yakin bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan karena itu semua orang termasuk orang Kristen, harus taat kepada perintah. Ayat-ayat tersebut sangat gamblang “Sebab barang siapa melawan perintah, ia melawan

ketetapan Allah dan siapa melakukannya, akan mendatangkan hukum atas dirinya”¹³

Masalah kelompok “ minoritas” dikalangan banyak orang Kristen terhadap salah paham besar dalam memahami ungkapan ini. Di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia semua warga Negara mempunyai hak yang sama. Meskipun jumlah orang Kristen sedikit bila dibandingkan dengan yang lain ,tidak berarti sama menjadi golongan minoritas . Orang Kristen secara realitik keberadaan jumlah kecil,tetapi tidak boleh didiskriminasikan,dan kalau ada upaya-upaya yang mencoba hal-hal pengdiskriminasian seperti itu,umat Kristen harus menentanginya secara politik.

Kalau jujur ,sedikit sekali yang telah dilakukan gereja dan persekutuan dalam bidang-bidang hak asasi manusia yang lain.Pertimbangan politis bahwa hal-hal

seperti itu sebaiknya tidak dipersoalkan demi keberhasilan hubungan baik dengan pemerintah/penguasa dalam arti mendapat perlindungan oleh karena telah bersikap sebagai “anak manis” lebih menentukan dari pada pertimbangan iman dan bela-rasa.

Sikap gereja dan persekutuan yang ditampilkan seperti uraian diatas,sama sekali tidak membantu penerimaannyasebagai bagia yang wajar dari masyarakat. Gereja dan persekutuan cenderung membuat “jembatan”dengan pemerintah/penguasa ditambah dengan golongan elit. Itu sudah dianggap mewakili masyarakat.Gereja lupa bahwa pemerintah /pengusaha dan golongan elit bisa jauh dari masyarakat. Alkitabnya pekerjaan yang paling penting,yaitu membangun “jembatan” dengan masyarakat secara efektif berbela rasa atau berjuang mewujudkan HAM bersama-sama tidak dicobakan. Maka tidak heran kalau pada saat

¹³ E.G.Singgih,Op.Cit,31

ini gereja mengalami kelakuan yang tidak baik, sedikit sekali mendapat simpati dari masyarakat kecil. Menjadi pertanyaan bagi umat Kristen saat ini adalah bagaimana gereja dalam realisasi kehidupan politik seperti yang di gambarkan di atas? Bagaimanapun juga gereja-gereja di Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga mau atau tidak mau gereja harus terlibat langsung dalam realisasi kehidupan politik di Indonesia. Menurut A.A. Yewangoe :

Kalau kita membaca sejarah gereja, cukup jelas bahwa gerakan reformasi bukanlah “benda asing” bagi gereja. Kalau saja kita selidiki kembali kepada Alkitab, kita membaca bagaimana raja Yosia memulai gerakan reformasi setelah ia menemukan kembali gulungan kitab Taurat yang selama ini terpendam-II Raja-Raja 22:23. Ia atas dasar itu melakukan pembaharuan politik baik terhadap kehidupan keagamaan maupun terhadap kehidupan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, maka reformasi berarti penemuan kembali tatanan masyarakat dan agama yang benar selama ini sudah di

tinggalkan. Ini juga berarti suatu akta pertobatan.¹⁴

Gereja atau para pemimpin gereja sebagian dari masyarakat, harus menjadi pelopor-pelopor dalam perjuangan reformasi. Baik itu dibidang politik, ekonomi, sosial dan juga dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja yang dibერი Amanat Agung dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, untuk meneruskan kabar baik tentang pembenbasan tidak diharapkan bersifat pasif ataupun bertentang dengan pemberitahuan.

Sebaliknya gereja harus menjadi pelopor untuk membaharui masyarakat. Dengan kata lain seharusnya gereja reformator. Dengan demikian ppertama-tama gereja harus membaharui dirinya sendiri. Menjauhi diri dari pemecahan dan memperlihatkan solidaritas yang penuh terhadap bangsa yang menderita ini. Apalagi

¹⁴ A.A. Yewangoe, Gereja di era Reformasi,

dalam iklim kekerasan yang melanda Indonesia sekarang ini dimana harga nyawa sangat murah, intensitas gereja pun harus diperjuangkan.

Gereja harus mengkritik dan menolak dengan keras apabila mendengar ataupun mengetahui para pejabat yang korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi sumber penderitaan rakyat. Gereja harus melawan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat Negara merugikan rakyat ataupun menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga menindas kaum lemah dan miskin.

Pengalaman masa lalu dimana gereja diatur dan dikendalikan oleh penguasa harus menjadi pelajaran yang sangat berharga saat ini, bahwa sekarang gereja tidak boleh terkontaminasi dengan pemerintah dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Apa lagi gereja merelakan dirinya menjadi alat politik pemerintah tetapi harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja

tidak boleh lagi merasa takut untuk menyuarakan suara kenabiannya.

Dalam masalah ini gereja-gereja di Indonesia harus menyuarakan ketidakadilan yang dialami. Gereja atau kekristenan bukanlah agama yang dilarang, melainkan agama yang sah di antara agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi keterlibatan gereja dalam politik perlu dibedakan dengan keterlibatan secara praktis. Hal ini jelas tidak boleh terjadi karena gereja bukanlah partai politik. Prinsip gereja untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia adalah politik praktis. Itu pun bukan berarti sebagai anggota gereja tetapi sebagai warga Negara yang mendirikan partai yang terjun disana.

Menurut Natan Setiabudi Bahwa:

Secara tidak langsung gereja berpolitik itu tidak boleh. Bahkan warga gereja pun tidak diperbolehkan terjun dalam dunia politik. Kenapa? karena sebenarnya warga gereja berpolitik sebagai warga Negara, bukan sebagai warga gereja. Jadi kalau ada pendeta yang berpolitik sebagai pendeta, itu akan kacau-balau, karena prinsipnya berbeda. Dari segi hukum pun cocok,

karena kalau ada warga gereja yang hendak berpolitik praktis dengan menjadi caleg atau calon presiden sekalipun, tetapi dia sebagai warga Negara, tentu tidak bisa. Sebagai warga gereja, kita mempunyai panggilan untuk melayani bukan berpolitik praktis. Tetapi mendukung atau mengingatkan para elite politik kristiani supaya mereka tidak lupa dengan panggilannya. Itu tidak salah.¹⁵

Dari Uraian tersebut di atas, maka pemahaman bahwa dunia politik adalah dunia yang tidak bersangkut paut dengan kehidupan gereja harus di tentang, justru sebaliknya gereja perlu "berpolitik" dalam pengertian tidak langsung berpolitik praktis. Mengapa? karena gereja bukan partai politik. Gereja adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan maka gereja perlu menyatakan kehendak dalam bidang politik melalui suara kenabiannya. Gereja harus berani menegur jika pemerintah telah sewenag-wenang dalam kekuasaannya terhadap rakyat.

Boleh jadi semua pihak menampilkan adanya suatu tatanan kehidupan politik yang

didalamnya semua orang hidup dalam kasih, persaudaraan yang baik. Semua orang memperbolehkan perlakuan yang adil. Apakah paradigma yang demikian merupakan mimpi? Suatu mimpi yang mustahil menjadi kenyataan? Terhadap pernyataan di atas penulis mengutip pendapat dari Uskup Dom Helder Camara dari Brasil yang dikutip oleh Silaen sebagai berikut: "Bila kita bermimpi sendiri, maka itu hanya berupa mimpi. Tetapi bila kita sama-sama bermimpi, maka akan menjadi permulaan dari suatu kenyataan."¹⁶

SIMPULAN

Kesimpulan

Politik adalah segala cara dimana kekuasaan digunakan untuk menata, mengatur dan memperbaharui hal-hal pokok dalam pemerintahan sehingga masyarakat dapat hidup dalam suatu ketentraman, keteraturan dan dengan demikian masyarakat

¹⁵ Natan Setiabudi, Victorius, Edisi

¹⁶ Victor Sialen, Op. Cit, 148

dapat melakukan pekerjaan dan menjalankan kehidupannya dalam suatu suasana yang aman, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka bidang politik haruslah dipandang sebagai arena pelayanan Kristen dari waktu ke waktu hingga tiba waktunya penyempurnaan Allah pada garis batas akhir yakni kiamat bagi manusia dan dunia,

Pada hakekatnya, keterlibatan gereja dalam bidang politik bertujuan untuk menampakkan kehendak Allah dan keseriusan Allah yang bulat bagi kemanusiaan yang utuh, penuh dan menyeluruh. Dari sudut pandang ini, maka strategi gereja selama ini dalam bidang politik yang cenderung diam dengan bersikap sebagai “anak manis” penguasa, yang menyadarkan diri agar penguasa berubah. Demikian pula keterlibatan gereja secara praktis. Mengapa? Karena Gereja bukan partai politik. Tidak mengherankan kalau kekristenan di Indonesia selalu linglung menghadapi perubahan. Demikian pula dalam pergelaran kekerasan struktur pada masa orde baru, tidak pernah dihadapi oleh gereja secara “prophetic”, karena gereja telah terkooptasi dalam pemerintahan dengan strategi menempatkan orang-orangnya dalam gereja.

Puncak kelakuan dari strategi gereja yang tidak efektif diatas diperlihatkan menjelang keruntuhan rezim soeharto. Sekelompok elite politik gereja yang ada dalam struktur pemerintahan bersama-sama dengan ketua umum persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI masa bakhti 1994-1999, pergi ke Istana untuk mempersembahkan uang dan emas, pada hal itu masyarakat luas yang tergabung dalam gerakan-gerakan pro-demokrasi telah melakukan perlawanan untuk “melengserkan” rezim Soeharto yang otoriter dan absolute, dimana demokrasi hanya sebagai “label”. Anggota DPR/MPR yang didalamnya termasuk para politisi Kristen hanya “mengiyakan” kehendak penguasa.

Realita secara kongkrit memberi pengaruh terhadap orang Kristen mengenai politik otoriter dan absolutisme, dimana pada diri penguasa terkandung kuasa ilahi walaupun terjadi kesewenang-wenangan.

Oleh karena itu gereja perlu merefleksikan kembali secara kritis keterlibatan dalam bidang politik. Dengan bercermin pada Alkitab maka sudah seharusnya gereja kembali pada hakekatnya. Dalam hal ini pertama-tama gereja terlebih dahulu membaharui dirinya kemudian

barulah memperbaharui kehidupan masyarakat termasuk kehidupan berpolitik.

Keterlibatan gereja dalam bidang politik juga harus dibedakan dengan keterlibatan secara praktis. Sebagai warga gereja orang Kristen mempunyai panggilan untuk melayani dalam bidang politik dengan cara berpolitik praktis. Gereja disini justru mendukung dan mengingatkan pada politikus Kristen supaya mereka tidak lupa dengan panggilannya sebagai duta bagi bangsa dan Negara, berarti harus menjalankannya sesuai dengan rambu-rambu Firman Tuhan dalam berpolitik.

Dengan demikian maka tujuan dan panggilan gereja untuk melayani dalam bidang politik adalah untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang sudah porak-poranda kepada tatanan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah yang bercirikan kasih, keadilan, sejahtera dan kemakmuran. Terhadap kesewenang-wenangan, absolutisme, sikap otoriter, gereja harus berani mengkritik dan menegur melalui berbagai saluran misalnya melalui DPR dan MPR.

Hal yang paling dibutuhkan saat ini bagi gereja-gereja di Indonesia adalah perubahan paradigma menuju suatu tatanan yang berangkat dari sudut pandang Alkitab.

Pembaharuan pada diri gereja harus senantiasa dan berjalan terus dan itulah sebetulnya hakekat gereja dalam berperan dalam berpolitik di Indonesia.

Saran

Dari uraian dalam karya ilmiah ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai masukan dan kajian selanjutnya dalam kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai berikut :

1. Disarankan kepada politisi Kristen agar memiliki sikap berpihak pada kaum yang lemah dan belalah hak-hak mereka.
2. Politisi Kristen harus memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
3. Umat Kristiani juga harus secara aktif melibatkan diri dalam politik praktis dengan cara mengawasi pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat.
4. Umat Krsiten juga turut dalam menjaga keamanan nasional dengan memberikan dukungan kepada pemerintah mulai dari RT, RW dan seterusnya agar dilingkungan, masing-masing hidup dalam suasana tenang dan menjadi pendamai

sehingga dilingkungannya hidup dalam damai sejahtera.

5. Gereja perlu menyusun suatu kurikulum pendidikan politik agar gereja mampu mengangkat dan menghubungkan dengan iman Kristen dan politik.
6. Menentukan suatu bentuk partisipasi politik dari gereja-gereja terhadap Negara dan implikasinya dalam kehidupan warga gereja.
7. Membuka diri terhadap komponen-komponen lain dari bangsa ini dalam menyikapi berbagai hal menyangkut bidang politik seperti ketidak-adilan dan pelanggaran-pelanggaran HAM dan politik.
8. Karya ilmiah ini sebagai suatu kajian dan disempurnakan selanjutnya bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

O.Notohamijoyo, *Iman Kristen dan Politik*,

Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1972,

9.

Laporan Sidang Lengkap V PGI, Yesus

Kristus Gembala Yang Baik, Tugas

Kristen dalam Revolusi Indonesia,

Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1972,
276-277.

Suara Pembaharuan, Rabu, 14 Maret 2001

Verkuyl, J. *Etika, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sv “politik”

Verkuyl, J. *Etika, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sv “politik”

Prabowinotto, basoeki, *Ikrar dan Ikhtiar dalam Hidup*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995

Tom. B. Jones, dikutip Saut Sirait, Politik

Kristen di Indonesia, Jakarta : BPK

Gunung Mulia 2001

George Sabirne, *Teori-teori Politik*, Jakarta :

Binacipta, 1977

Prof. Dr. K. Bertens, *Sejarah Filsafat*

Yunani, Yogyakarta : Kanisius, 1999

Notohamidjo, Op.Cit, 10.

- Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 200
- Hachdar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Jakarta : Biggraf Publishing, 2000,27
- J. Verkuyl, Op. Cit, 120.
- Saut Sirait, Op. Cit, 30.
- Siswono Yudohusodo, *Semangat Baru Nasionalisme Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Bangsa, 1996, 32.
- Saut Sirait, Op. Cit, 34
- J.A. Jongeneel, *Hukum Kemerdekaan I*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1990, 10.
- Frans Magnez Suseno, *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia, 2001, 4-5.
- Broto S. Wiryoteno, *Kepedulian Krsieten Terhadap Kehidupan Bersama Negarawi*, Jakarta : Seminar Harapan, 1998, 79.
- Th. C. Vriezen, *Agama Israel Kuno*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000, 68.
- Von Rad, *Musa*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1985, 5-10.
- Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis Soekarno*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1999, 121.
- Ensiklopedia Alkitab Masa Kini* Jilid, I. s.v “hakim.”
- Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001, 81.
- Th. C. Vriezen, Op.Cit, 189.
- Von Rad, Op.Cit, 58-59
- Ayub Ranoh, Op. Cit,126.
- Th. C. Vriezen, Op.Cit, 193.
- Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I*, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina kasih/OMF, 1999, 43-44
- DS.J.B.Boland, *Tafsiran Kitab Amos*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001, 43.
- Frank M. Boyed, *Tafsiran Kitab Nabi-nabi Kecil*, Malang : Gandum Mas, 2001, 44.

- S.H. Widyapranawa, *Tafsiran Kitab Yesaya* 1-13, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1986, 2.
- Ch. Barth, *Teologi Perjanjian Lama*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1998, 25
- Frank M. Boyed, Op.Cit, 5.
- Th.C.Vriezen, *Agama Israel Kuno*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000,208.
- Max Webber, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta :Kanisius, 1996, 73.
- R.T. France *Yesus Sang Radikal*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002, 19.
- R.T. France, Op.Cit, 75.
- Ayub Ranoh, Op. Cit, 156.
- Th. Van Den End, *Tafsiran Surat Roma*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1997, 3.
- Ibid, 3.
- Tafsiran Alkitab Masa Kini Jilid 3*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1980, 458.
- Th. Van Den End, Op. Cit, 600.
- E.G. Singgih, *Iman dan Berpolitik Dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000, 4
- Suara Pembaharuan, Rabu, 4 Februari 2001, 5
- “Kompas” 4 Februari 2003, 5
- Arief Budiman, Kompas, 29 Januari 2003, 8.
- DR. S.A.E. Nababan, *Gereja dan Reformasi*, Jakarta : Yakoma, PGI, 1999, 216.
- Majalah Narwastu, September, 1996, 185.
- T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen Dalam Perang Revolusi dan Pembangunan : Berjuang Mengembalikan Pancasila Dalam Terang Iman*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995, 159.
- Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Jakarta : Obor, 1998, 42.
- J.Verkuyl,Op.Cit,131
- Saut Sirait,Op.Cit,241
- E.G.Singgih,Op.Cit,31
- A.A.Yewangoe,*Gereja di era Reformasi*, Jakarta:Yakoma PGI,1999,167

Teologi

Natan Setiabudi, Victorius, Edisi

April, 2002, 6

Victor Sialen, Op. Cit, 148